



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

24 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
5. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan
Seribu
8. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI
Jakarta
9. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota
Administrasi
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 44/SE/2021**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 1 OKTOBER 2021**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002, dengan ini diharapkan perhatian Saudara terkait proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 1 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Agar membuat daftar nominatif usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk dinaikkan pangkatnya dalam satu surat pengantar beserta softcopy (format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 1) dengan ketentuan:
 - a) disusun berdasarkan golongan ruang/pangkat;
 - b) jenis huruf yang digunakan adalah Arial;
 - c) usul kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu dan kenaikan pangkat IV/c keatas dibuatkan daftar terpisah;
 - d) tidak mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses hukuman disiplin.

2. Usul kenaikan pangkat dimaksud agar dilengkapi dengan:

a. Kenaikan Pangkat Reguler (Kenaikan Pangkat Staf Non Penyesuaian Ijazah):

- 1) Fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir, untuk kenaikan pangkat pertama kali lampirkan fotokopi SK CPNS dan SK PNS yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi yang sudah lulus ujian dinas yang dilegalisir;
- 3) Fotokopi Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan (STLUPP) yang dilegalisir, bagi yang sudah lulus Ujian Peningkatan Pendidikan, ditambah dengan :
 - a) Fotokopi Ijazah yang dilegalisir Pejabat yang berwenang oleh Universitas;
 - b) Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir Pejabat yang berwenang oleh Universitas;
 - c) Uraian Tugas Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan bukan Pelaksana Tugas (Plt);
 - d) Fotokopi Surat Ijin Belajar yang dilegalisir, jika Ijazah diperoleh sebelum menjadi PNS harap melampirkan Surat Keterangan Belajar Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan bukan Pelaksana Tugas (Plt);
 - e) Hasil cetak pencarian data mahasiswa dari <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa>;
 - f) Fotokopi Akreditasi BAN-PT untuk program studi yang diambil dan yang berlaku sesuai tanggal kelulusan yang dilegalisir oleh Universitas;
- 4) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
- 5) Fotokopi Surat Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi yang pernah menduduki jabatan fungsional yang dilegalisir;
- 6) Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan **tidak melebihi golongan atasan langsung**;
- 7) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2019 dan 2020 **lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun pada setiap bagian tanda tangan (mohon ditambahkan manual karena belum tercetak dari sistem)** dengan setiap unsur nilai minimal baik (76) yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

b. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural:

- 1) Fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi surat keputusan pengangkatan beserta surat pernyataan pelantikan dalam jabatan terakhir dan jabatan sebelumnya yang dilegalisir;
- 3) Daftar Riwayat Jabatan (bisa diambil dari daftar riwayat hidup (drh) di Sistem Pegawai (SIMPEG) BKD di situs <https://pegawai.jakarta.go.id/>;
- 4) Bagi Pejabat Eselon IV yang sudah lulus Ujian Peningkatan Pendidikan S2 dan mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan IV/a, harap melampirkan dokumen tambahan yaitu:
 - a) Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan (STLUPP) yang dilegalisir;

- b) Fotokopi Ijazah yang dilegalisir Pejabat yang berwenang oleh Universitas;
 - c) Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir Pejabat yang berwenang oleh Universitas;
 - d) Uraian Tugas Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan bukan Pelaksana Tugas (Plt);
 - e) Fotokopi Surat Ijin Belajar yang dilegalisir. Jika Ijazah diperoleh sebelum menjadi PNS harap melampirkan Surat Keterangan Belajar Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan bukan Pelaksana Tugas (Plt);
 - f) Hasil cetak pencarian data mahasiswa dari <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa>;
 - g) Fotokopi Akreditasi BAN-PT untuk program studi yang diambil dan yang berlaku sesuai tanggal kelulusan yang dilegalisir oleh Universitas;
- 5) Bagi Pejabat Eselon III yang mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan IV/a, harap melampirkan dokumen tambahan yaitu:
- a) Bagi Pejabat yang belum memiliki Ijazah S2, melampirkan Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II (STLUD) yang dilegalisir bagi yang sudah lulus Ujian Dinas Tingkat II, atau melampirkan Sertifikat Diklat PIM 3 yang dilegalisir bagi yang belum lulus Ujian Dinas Tingkat II;
 - b) Bagi Pejabat yang sudah memiliki Ijazah S2, lampirkan:
 - i. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir Pejabat yang berwenang oleh Universitas;
 - ii. Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir Pejabat yang berwenang oleh Universitas;
 - iii. Fotokopi Surat Ijin Belajar yang dilegalisir. Jika Ijazah diperoleh sebelum menjadi PNS harap melampirkan Surat Keterangan Belajar Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan bukan Pelaksana Tugas (Plt);
 - iv. Hasil cetak pencarian data mahasiswa dari <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa>;
 - v. Fotokopi Akreditasi BAN-PT untuk program studi yang diambil dan yang berlaku sesuai tanggal kelulusan yang dilegalisir oleh Universitas;
- 6) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
- 7) Fotokopi Surat Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi yang pernah menduduki jabatan fungsional yang dilegalisir;
- 8) Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan **tidak melebihi golongan atasan langsung**;
- 9) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2019 dan 2020 **lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun pada setiap bagian tanda tangan (mohon ditambahkan manual karena belum tercetak dari sistem)** dengan setiap unsur nilai minimal baik (76) yang dilegalisir terdiri dari :
- a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

c. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu:

- 1) Fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir, untuk kenaikan pangkat pertama kali lampirkan fotokopi SK CPNS dan SK yang dilegalisir;

- 2) Fotokopi surat keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional terakhir yang dilegalisir;
- 3) Penetapan Angka Kredit (PAK) asli dan fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) sebelumnya yang dilegalisir;
- 4) Apabila dalam PAK telah dinilai Pendidikan baru, lampirkan dokumen tambahan yaitu:
 - a) Fotokopi Ijazah yang dilegalisir Pejabat yang berwenang oleh Universitas;
 - b) Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir Pejabat yang berwenang oleh Universitas;
 - c) Fotokopi Surat Ijin Belajar yang dilegalisir, jika Ijazah diperoleh sebelum menjadi PNS harap melampirkan Surat Keterangan Belajar Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan bukan Pelaksana Tugas (Plt);
 - d) Hasil cetak pencarian data mahasiswa dari <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa>;
 - e) Fotokopi Akreditasi BAN-PT untuk program studi yang diambil dan yang berlaku sesuai tanggal kelulusan yang dilegalisir oleh Universitas;
- 5) Surat klarifikasi PAK bagi usulan kenaikan pangkat IV/c ke atas;
- 6) Surat hasil Uji Kompetensi bagi jabatan fungsional yang dipersyaratkan ketika naik jenjang jabatan fungsional;
- 7) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2019 dan 2020 **lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun pada setiap bagian tanda tangan (mohon ditambahkan manual karena belum tercetak dari sistem)** dengan setiap unsur nilai minimal baik (76) yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
- 8) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;

d. Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah:

- 1) Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKP) yang dilegalisir;
- 2) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Ijazah dan transkrip nilai yang wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002);
- 3) Fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir, untuk kenaikan pangkat pertama kali lampirkan fotokopi SK CPNS dan SK PNS yang dilegalisir;
- 4) Uraian Tugas Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan bukan Pelaksana Tugas (Plt);
- 5) Fotokopi Surat Ijin Belajar yang dilegalisir, jika Ijazah diperoleh sebelum menjadi PNS harap melampirkan Surat Keterangan Belajar Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan bukan Pelaksana Tugas (Plt);
- 6) Hasil cetak pencarian data mahasiswa dari <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa>;
- 7) Fotokopi Akreditasi BAN-PT untuk program studi yang diambil dan yang berlaku sesuai tanggal kelulusan yang dilegalisir oleh Universitas;

- 8) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2019 dan 2020 **lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun pada setiap bagian tanda tangan (mohon ditambahkan manual karena belum tercetak dari sistem)** dengan setiap unsur nilai minimal baik (76) yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun
 - c) Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
 - 9) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
3. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil selain yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat diusulkan sepanjang tidak melampaui golongan ruang atasan langsungnya.
 4. Bagi pegawai yang telah **lulus Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Peningkatan Pendidikan** dapat diusulkan jika **telah 4 (empat) tahun dari kenaikan pangkat terakhirnya**.
 5. Berkas usul Kenaikan Pangkat IV/c keatas dibuat rangkap 2 (dua) dan dilegalisir oleh kepegawaian unit kerja. Berkas usul IV/c ke atas harap dikirim langsung ke BKD Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk hardcopy dan softcopy (scan pdf).
 6. Berkas usul kenaikan pangkat di bawah pangkat/golongan Pembina Tingkat I (IV/b) di pindai atau scan berwarna (bukan foto) menjadi format file .pdf dengan ukuran **masing-masing file kurang dari 1,9 MB** dengan ketentuan penamaan file sebagai berikut :

NO	SCAN BERKAS	FORMAT FILE (.pdf) MAX 1,9 MB	CONTOH
1	SK CPNS	SK_CPNS_NIP	SK_CPNS_199604102019022003.pdf
2	SK PNS	SK_PNS_NIP	SK_PNS_199604102019022003.pdf
3	SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR	SK_KP_GOLRU_NIP	SK_KP_31_199604102019022003.pdf (Golongan Ruang dikonversi dalam bentuk angka, contoh: III/a = 31, II/d = 24, dst.)
4	SKP 2 TAHUN TERAKHIR (TIAP TAHUN 1 FILE)	SKP_TAHUN_NIP	SKP_2020_199604102019022003.pdf, SKP_2019_199604102019022003.pdf (1 PNS 2 FILE SKP)
5	IJAZAH TERAKHIR (TERMASUK DI DALAMNYA AKREDITASI BAN PT DAN FORLAP DIKTI)	IJAZAH_PENDIDIKAN_NIP	IJAZAH_S1_199604102019022003.pdf
6	TRANSKRIP NILAI	TRANSKRIP_PENDIDIKAN_NIP	TRANSKRIP_S1_199604102019022003.pdf

NO	SCAN BERKAS	FORMAT FILE (.pdf) MAX 1,9 MB	CONTOH
7	IZIN BELAJAR (BERLAKU UNTUK IZIN BELAJAR ATAU SURAT KETERANGAN BELAJAR)	IBEL_TAHUN_NIP	IBEL_2008_1996041020 19022003.pdf
8	URAIAN TUGAS	URAIAN_TUGAS_NIP	URAIAN_TUGAS_19960 4102019022003.pdf
9	PAK (PAK TERAKHIR YANG ASLI DAN PAK SEBELUMNYA LEGALISIR)	PAK_NIP	PAK_199604102019022 003.pdf
10	TUGAS BELAJAR	TUBEL_TAHUN_NIP	AKREDITASI_19960410 2019022003.pdf
11	KETERANGAN ATASAN LANGSUNG	SUKET_NIP	SUKET_1996041020190 22003.pdf
12	SK MUTASI (bagi PNS yang baru mutasi dari Instansi lain di luar Pemprov. DKI Jakarta)	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_19960410 2019022003.pdf
13	SK JABATAN (SK JABATAN STRUKTURAL, TERMASUK DI DALAMNYA SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN)	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_19960410 2019022003.pdf
14	DAFTAR RIWAYAT JABATAN	DRJ_NIP	DRJ_1996041020190220 03.pdf
15	SK JFT (PEMBEBASAN/ PENGANGKATAN KEMBALI/ NAIK JENJANG JFT)	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_19960410 2019022003.pdf
16	DIKLAT PIM III	SK_PIM_NIP	SK_PIM_1996041020190 22003.pdf
17	STLUKP (BAGI YANG LULUS UJIAN PI ATAU PP)	STLUKP_PENDIDIKAN_NIP	STLUKP_S1_199604102 019022003.pdf
18	STLUD (BAGI YANG LULUS UJIAN DINAS)	STLUD_NIP	STLUD_1996041020190 22003.pdf
19	SERTIFIKAT PENDIDIK	SERDIK_NIP	SERDIK_199604102019 022003.pdf
20	NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT	NUKP_NIP	NUKP_19960410201902 2003.pdf
21	UJI KOMPETENSI	UJIKOM_NIP	UJIKOM_199604102019 022003.pdf

NO	SCAN BERKAS	FORMAT FILE (.pdf) MAX 1,9 MB	CONTOH
22	SK PENCANTUMAN GELAR (LPP)	LPP_NIP	LPP_1996041020190220 03.pdf
23	PENINJAUAN MASA KERJA	PMK_NIP	PMK_199604102019022 003.pdf

7. Surat Usulan dan Rekap Data Usulan dikirimkan langsung ke Badan Kepegawaian Daerah sedangkan Berkas Usulan yang sudah di scan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui email kenaikanpangkatdki@gmail.com mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Sekretariat DPRD, Biro, dan RSUD tipe A dan B, usulan melalui Instansi yang bersangkutan;
 - Inspektorat Pembantu, Suku Badan, Suku Dinas, Satpol PP Kota Administrasi, Sekretariat Kota, Kecamatan, Kelurahan disampaikan melalui Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi, serta untuk di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disampaikan melalui Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - Khusus Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan berlaku ketentuan:
 - Usulan kenaikan pangkat menjadi pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) ke bawah, usulan melalui Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi.
 - Usulan kenaikan pangkat menjadi pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) ke atas, usulan melalui Dinas Pendidikan.
 - Usul kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, Surat Usulan diajukan terpisah dengan usul Kenaikan Pangkat PNS yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional Umum.
8. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang telah ditentukan tidak akan diproses.

Demikian edaran ini untuk dipedomani dan menjadi perhatian Saudara.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya
NIP. 196607191985032002

Tembusan :

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Contoh surat pernyataan bagi yang memiliki Ijazah sebelum PNS

KOP SURAT SKPD

SURAT KETERANGAN BELAJAR
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : PNS
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :

Telah mengikuti pendidikan strata (satu / dua) pada program studidi
(Universitas/STKIP/STIA/STMIK) dari tahun..... sampai dengan..... ,
pendidikan yang diperoleh sangat dibutuhkan dan terdapat formasi pada BADAN/DINAS
(nama SKPD) serta tidak keberatan untuk diajukan dalam penyesuaian ijazah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk
menjadi bahan pertimbangan proses kenaikan pangkat ke golongan ruang

Jakarta,.....
Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

Nomor : 44/SE/2021
Tanggal : 24 Juni 2021

Contoh surat Keterangan tidak sedang hukuman disiplin

SURAT KETERANGAN

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dengan ini menerangkan :
Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan :

- 1. tidak sedang dalam pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin atau tidak sedang menjalani menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- 2. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara;
- 3. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
- 4. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
- 5. tidak sedang menjalani pidana penjara;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan usulan kenaikan pangkat periode 1 April 2019.

Mengetahui/Menyetujui

(Kepala SKPD)
NIP

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 44/SE/2021
Tanggal : 24 Juni 2021

Contoh Uraian Tugas

KOP SURAT SKPD

URAIAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : PNS
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :

Sebelum memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Setelah memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4 dst

Demikian uraian tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat 1 Oktober 2021.

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)

NIP.....

Tanggal :

Contoh Surat Keterangan Atasan Langsung



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Muis No.66 Gedung Teknis Lantai 8

Telepon : (021) 3865580 - 3865581

Fax : (021) 3865662

JAKARTA

Kode Pos : 10160

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG

Nomor : 2 / - 087.4

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herdi Melanto, S.E., M.Si.
NIP/NRK : 197205031998031008/123786
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Badan
Unit Kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : Anggoro Tutuko, S.E., M.AP
NIP/NRK : 198308052011011011/185091
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
Unit Kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Sampai saat ini masih bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan digunakan untuk
kelengkapan administrasi kenaikan pangkat periode 1 April 2021.

Jakarta, 4 Januari 2021

Sekretaris BPSDM
Provinsi DKI Jakarta,

Herdi Melanto
NIP 197205031998031008